

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA UMKM MAKANAN RINGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sofi Dwi Ayu Cahyani¹

¹Universitas Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan catatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung. Metodologi analisis deskriptif digunakan dalam mencapai tujuan ini. Metode analisis deskriptif digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik bisnis kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung. Hasil studi menunjukkan bahwa subjek investigasi di Kabupaten Tulungagung, khususnya usaha kecil dan menengah, tidak secara dominan menggunakan metode pencatatan akuntansi yang komprehensif, sehingga menunjukkan bahwa entitas tersebut belum mengadopsi praktik akuntansi yang diperlukan secara memadai. Ketidakmampuan ini dapat dikaitkan dengan kelangkaan sumber daya manusia ditambah dengan defisit dalam kemahiran atau pengetahuan akuntansi. Praktik pencatatan akuntansi yang dilaksanakan oleh UD Hikmah di Kota Tulungagung hanya mewakili aspek minimal dari keseluruhan kerangka pencatatan akuntansi. Keterbatasan ini muncul dari kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang penyusunan laporan keuangan secara rinci, yang akibatnya telah mengakibatkan ketidakmampuan pemilik UD Hikmah untuk memastikan angka laba yang tepat.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi, SAK EMKM, UMKM Tulungagung

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan keseimbangan ekonomi, usaha kecil adalah komponen penting dari perekonomian Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) bertahan selama krisis moneter Indonesia 1998. Sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki sistem akuntansi yang dapat mengatur dan mengelola semua operasi dan kegiatan perusahaan. Dengan menerapkan sistem akuntansi, semua operasi bisnis dapat berjalan lancar, dimulai dari mengisi dokumen bukti transaksi hingga membuat laporan keuangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh usahawan kecil adalah pengelolaan keuangan dan manajemen yang tidak mematuhi standar akuntansi yang tepat dan akurat.

Sistem akuntansi mewakili penerapan kerangka akuntansi pengeluaran kas yang kuat dalam suatu organisasi, yang memberikan beberapa keuntungan signifikan. Keuntungan ini termasuk optimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, mitigasi potensi penyalahgunaan dan penggelapan sumber daya keuangan, dan fasilitasi peramalan yang akurat mengenai anggaran kas yang diperlukan untuk kegiatan operasional organisasi di masa depan. Indonesia, negara yang melimpah dalam sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia

(SDM), menganggap sumber daya ini sebagai aset terpenting dalam lintasan perkembangannya. Meskipun demikian, kondisi ekonomi yang berlaku di Indonesia menunjukkan tingkat ketidakstabilan, sehingga memposisikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai instrumen yang efektif untuk penciptaan lapangan kerja; selain mengurangi pengangguran, UKM juga memiliki fungsi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Peran ganda ini, yang mencakup penyediaan peluang kerja dan menghasilkan output yang berharga bagi masyarakat, dapat diidentifikasi sebagai salah satu strategi penting bagi Indonesia untuk menavigasi jalan keluar dari krisis ekonomi.

Usaha kecil dapat menggunakan lembaga keuangan perbankan sebagai sumber modal utama. Namun, untuk berkolaborasi dengan bank, usaha kecil harus membuat proposal yang layak dan mampu menghasilkan keuntungan. Selain itu, lembaga keuangan perbankan mengharuskan usaha kecil menunjukkan kemampuan berkas, yang memerlukan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dari lembaga keuangan. Situasi ini menimbulkan tantangan, karena bank cenderung berhati-hati dan berhati-hati, sehingga memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil dalam mengamankan sumber modal. Usaha kecil yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendanaan bank dapat menggunakan solusi keuangan alternatif. Dalam hal ini, mereka dapat beralih ke pemberi pinjaman swasta, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai paymaster, meskipun usaha kecil harus siap untuk menanggung biaya selangit yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Ada kesalahpahaman bahwa usaha kecil tetap acuh tak acuh terhadap suku bunga selangit yang terkait dengan pinjaman; Namun, mereka terpaksa menggunakan praktik pinjaman predator karena hambatan yang kuat dalam memperoleh modal dari lembaga perbankan tradisional. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dilaporkan sebesar 57,9 juta unit usaha (Merdeka.com), memposisikan bangsa ini di antara pemimpin di sektor usaha industri dibandingkan dengan negara lain, khususnya sejak 2014. Sektor ini terus berkembang, dengan proyeksi menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia akan bertahan dalam lintasan kenaikan pada tahun 2016. Pada tahun itu, diharapkan pertumbuhan UMKM akan tetap konsisten. Hingga saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah telah berkontribusi 58,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyumbang 97,30% dari penyerapan tenaga kerja.

Secara umum, Kota Tulungagung menunjukkan potensi besar di ranah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); lebih jauh lagi, Kabupaten Tulungagung menawarkan distribusi potensi usaha kecil yang relatif merata di 19 kabupatennya, yang semakin berkembang di berbagai sektor. Peluang bisnis yang melekat di Tulungagung mencakup beragam industri, termasuk kerajinan, batik, dan makanan dan minuman. Sangat penting bahwa potensi ini dipertahankan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga mendorong pembangunan dan kesetaraan di Kabupaten Tulungagung. Kehadiran usaha kecil di Tulungagung terutama ada di mana-mana, mencakup usaha individu dan kolektif. Mempertimbangkan potensi yang dimiliki usaha kecil dalam kaitannya dengan besarnya dan ruang lingkup sektor ekonomi yang mereka ikuti, prospek munculnya perusahaan baru dan kemajuan kewirausahaan dalam komunitas usaha kecil mewakili harapan yang signifikan dalam mengatasi tantangan di masa depan.

Selain kontribusinya yang signifikan terhadap lanskap ekonomi Tulungagung, sektor ini juga bergulat dengan berbagai tantangan terkait dengan sistem pendukung untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masalah umum adalah akuisisi modal dan strategi pemasaran. Tantangan mendasar mengenai modal muncul dari tidak implementasi sistem akuntansi yang kuat, karena banyak UMKM menghadapi hambatan selama fase pendirian mereka, yang terutama disebabkan oleh pemahaman mereka yang tidak memadai tentang praktik akuntansi; kurangnya pengetahuan ini merupakan hambatan utama bagi sebagian besar UMKM, karena mereka sering tidak jelas tentang persiapan yang diperlukan dan metodologi untuk keberhasilan implementasi. Skenario yang sebanding telah diamati di Hikmah Food Rengatan Sum, yang juga belum mengadopsi sistem akuntansi.

Penerapan Akuntansi

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, terutama tentang kekayaan, utang, modal, dan hasil usahanya selama suatu waktu (Risal & Wulandari, 2021).

Salmiah et al. (2015) menyatakan bahwa membuat pembukuan yang baik dan rapi adalah salah satu dari banyak keuntungan menggunakan akuntansi untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Laporan keuangan, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, akan menjadi lebih akurat dan tepat dengan pembukuan yang baik dan rapi. Selain itu, dinyatakan juga bahwa keuntungan lain dari menggunakan akuntansi adalah bahwa itu memudahkan kerja sama keuangan, seperti pembiayaan dengan pihak ketiga seperti bank, dan memungkinkan untuk melihat seberapa efektif dan efisien suatu bisnis (Darmawati & Oktaviani, 2018).

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada klasifikasi usaha yang dicirikan oleh skala dan kapasitas operasionalnya. Dalam kerangka operasionalnya, UMKM menggabungkan prinsip-prinsip dasar seperti kolaborasi kolektif, praktik ekonomi demokratis, otonomi, kemajuan yang adil, keberlanjutan, efisiensi peradilan, dan promosi kohesi ekonomi nasional. Tujuan menyeluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan komersial mereka dengan tujuan membina ekonomi nasional yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang adil.

Ketentuan yang mendefinisikan UKM diartikulasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitas, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM PP), khususnya dalam Pasal 35 hingga 36 (Muttaqien et al., 2022) :

1. Usaha Mikro didefinisikan memiliki modal kerja maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang tidak mencakup lahan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
2. Usaha kecil dikategorikan memiliki modal kerja yang melebihi Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tetapi tetap di bawah Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dan klasifikasi ini juga tidak termasuk lahan dan fasilitas usaha.
3. Usaha menengah diidentifikasi dengan modal kerja yang melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) namun terbatas pada maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sementara juga tidak termasuk tanah dan struktur yang berkaitan dengan operasi bisnis.

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)

Mengingat kompleksitas yang melekat dalam perumusan laporan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah kerangka SAK-ETAP, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengumumkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada akhir tahun 2016. Kerangka kerja SAK-EMKM menyajikan metodologi yang lebih efisien daripada SAK-ETAP dan menggambarkan transaksi yang biasanya dilakukan UKM. Standar ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) secara khusus berlaku untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). SAK-EMKM dirumuskan untuk entitas yang tidak menyebarluaskan laporan keuangannya dengan cara yang membuatnya dapat diakses oleh publik (Purba, 2019). SAK-EMKM secara eksplisit dirancang untuk UKM yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK yang berlaku (Kusuma & Lutfiany, 2018).

Sebagaimana diartikulasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1.1) dalam SAK-EMKM, istilah Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah dicirikan sebagai berikut (Purba, 2019):

1. Unit bisnis yang tidak memerlukan akuntabilitas publik yang substansif.
2. Entitas yang menghasilkan laporan keuangan dengan tujuan umum untuk pengguna di luar organisasi. Pengguna eksternal tersebut mencakup pemangku kepentingan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis, serta pemberi pinjaman dan lembaga lain, termasuk lembaga pemeringkat kredit.

Usaha dianggap memiliki akuntabilitas publik yang substansial jika:

1. Memberikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau badan pengatur lainnya untuk tujuan menerbitkan sekuritas di pasar modal, atau sedang dalam proses menyerahkan pernyataan tersebut; atau
2. Memiliki aset besar dan tanggung jawab fidusia untuk khalayak yang besar, seperti bank, penyedia asuransi, broker dan/atau pedagang sekuritas, dana pensiun, reksa dana, dan entitas perbankan investasi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan mewakili penggambaran yang terorganisir secara sistematis dari status keuangan entitas dan kemandirian operasional (SAK, 2017). Seperti yang digambarkan oleh SAK EMKM (2016:3), tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas yang berkaitan dengan spektrum luas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memenuhi persyaratan informasi tertentu, orang yang tidak terlibat langsung dapat meminta laporan keuangan khusus.

Laporan keuangan adalah alat untuk menggambarkan kondisi bisnis. Mereka menunjukkan pertumbuhan keuangan perusahaan dan tren pengelolaannya. Selain itu, laporan keuangan dapat menjadi persyaratan administratif bagi sebuah organisasi untuk dievaluasi dalam hal kelayakan untuk mendapatkan pinjaman atau membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Suatu metode secara fundamental dapat dicirikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, metodologi penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk melakukan pengamatan pada subjek penelitian yang berkaitan dengan isu-isu yang diuraikan dalam penelitian. Kategori penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif dijalankan dengan cara non-eksperimental mengenai subjek penelitian, selaras dengan kondisi atau realitas yang ada tanpa intervensi atau manipulasi apa pun.

Desain Penelitian ini di buat dengan melakukan studi kasus pada Usaha Makanan Ringan Hikmah di Desa Kepatihan, dengan harapan untuk bisa mendapatkan hal apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa didapatkan secara detail dan spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah jumlah usaha yang masih berjalan dan aktif menurut skala usaha di Kabupaten Tulungagung.

Kecamatan	Skala Usaha			Distribusi (%)
	UMK	UMB	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Besuki	3.265	28	3.293	2,43
020 Bandung	6.824	51	6.875	5,07
030 Pakel	6.048	40	6.088	4,49
040 Campurdarat	6.600	80	6.680	4,92
050 Tanggunggunung	1.383	4	1.387	1,02
060 Kalidawir	6.436	23	6.459	4,76
070 Pucanglaban	2.260	5	2.265	1,67
080 Rejotangan	6.695	43	6.738	4,97
090 Ngunut	11.753	171	11.924	8,79
100 Sumbergempol	9.078	40	9.118	6,72
110 Boyolangu	11.252	125	11.377	8,38
120 Tulungagung	13.808	330	14.138	10,42
130 Kedungwaru	13.841	200	14.041	10,35
140 Ngantru	6.095	53	6.148	4,53
150 Karangrejo	5.919	22	5.941	4,38
160 Kauman	8.303	63	8.366	6,16
170 Gondang	8.679	40	8.719	6,43
180 Pagerwojo	2.500	8	2.508	1,85
190 Sendang	3.629	10	3.639	2,68
Jumlah	134.368	1.336	135.704	100,00
	(99,02)	(0,98)	(100,00)	

Tabel 1. Jumlah Usaha Berdasarkan Skala Usaha dan Kecamatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak usaha mikro dan kecil (UMKM). Namun, ketika peneliti bertanya tentang pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Sugiarti memberikan pemaparan bahwa kurangnya sosialisasi dan keterbatasan Ibu

Sugiarti dan Pak Toni dalam penggunaan teknologi informasi membuat informasi pelatihan dari Dinas terkait tidak terdengar oleh telinga banyak pelaku UMKM di area mereka.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 (Seomohadiwidjojo, 2019), kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digambarkan sebagai berikut :

- Usaha Mikro, didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk lahan dan tempat usaha, dan ditandai dengan pendapatan penjualan tahunan tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha kecil, diklasifikasikan memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan pendapatan tahunan bervariasi dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Usaha menengah, ditandai dengan kekayaan bersih yang jatuh antara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di samping pendapatan tahunan mulai dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga batas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Usaha kecil dicontohkan dengan asetnya sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pendapatan tahunan sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Deskripsi Laporan Keuangan UMKM Hikmah

UMKM Hikmah mencatatkan beberapa transaksi yang terjadi ke dalam catatan yang telah dilakukan, pencatatan dilakukan dengan pencatatan yang sangat sederhana dan secara manual. Pencatatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran yang ada di UMKM Hikmah, berikut adalah beberapa pencatatan yang dilakukan:

Gipang Beras								
No.	Tanggal	Nama Toko	Produk	Jumlah	Harga	Expired	Kode Produksi	Harga
1.	18/04/2024	Subur	Beras	250 kg	-	-	-	Rp3.750.000
2.	18/04/2024	Subur	Gula	100 kg		-	-	Rp3.400.000
3.	18/04/2024	Subur	Plastik	30 kg		-	-	Rp990.000
4.	18/04/2024	Subur	Minyak	15 kg	-	-	-	Rp255.000
5.	18/04/2024	Subur	Gas	15 tabung	-	-	-	Rp270.000
6.	18/04/2024	Subur	Bumbu Lain	3 bungkus	-	-	-	Rp100.000
Total								Rp8.765.000

Tabel 2. Pembelian Bahan Baku UMKM Hikmah

Catatan Produksi

Catatan produksi pada UMKM Hikmah adalah catatan penggunaan bahan baku serta biaya-biaya lainnya seperti biaya gaji karyawan produksi, listrik dan juga gas. UMKM Hikmah mencatat beberapa produk yang dihasilkan dalam setiap produksinya. Berikut catatan yang telah dibuat oleh UMKM Hikmah:

Gipang Beras			
Bahan	Jumlah Kotor	Jumlah Bersih	Harga
Beras	250 kg	250 kg	Rp3.500.000
Gula	100 kg	100 kg	Rp3.400.000
Plastik	30 kg	3 piring	Rp990.000
Minyak	15 kg	105 lembar	Rp255.000
Gas	15 tabung		Rp270.000
Bumbu Lain	3 bungkus		Rp100.000
Biaya Produksi			Rp600.000
Biaya Packing			Rp720.000
Total			Rp9.835.000

Tabel 3. Laporan Produksi UMKM Hikmah Tahun 2024

Berdasarkan wawancara mengenai aset tetap milik UMKM Hikmah yang telah dilaksanakan, aset tetap yang digunakan untuk produksi adalah sebagai berikut:

Aset Hikmah			
No.	Nama Aset	Nilai Aset	Jumlah
1.	Bangunan	Rp200.000.000	
Total			Rp200.000.000
1.	Kompor	Rp10.000.000	
2.	Sealer	Rp5.000.000	
3.	Alat Pencetak	Rp5.000.000	
4.	Wajan dan Peralatan	Rp10.000.000	
5.	Peralatan Penunjang	Rp10.000.000	
Total			Rp40.000.000

Tabel 4. Catatan Aset UMKM Hikmah

Laporan Kas Masuk Dari Penjualan Tunai

Prosedur penjualan tunai pada UMKM Hikmah Tulungagung:

- Divisi penjualan menerima pesanan penjualan dan menghasilkan catatan penjualan yang terdiri dari dua lembar; lembar awal diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan

pengiriman barang, sedangkan lembar berikutnya diserahkan ke bagian administrasi operasional, khususnya kepada pasangan Pak Toni.

- b. Bagian administrasi operasional memperoleh catatan penjualan dari divisi penjualan, yang selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan laporan keuangan dan laporan penjualan yang belum sempurna secara manual. Catatan akan disimpan oleh sektor operasional sebagai bagian dari dokumentasi perusahaan.

Laporan Kas Masuk dari Penjualan Kredit

Prosedur yang berkaitan dengan penagihan piutang yang timbul dari penjualan kredit:

- a. Pelanggan diberikan nota penjualan kredit.
- b. Bagian admin operasional merekap nota penjualan kredit ke buku pembantu.
- c. Divisi gudang memproses dan mengemas pesanan sesuai dengan nota penjualan kredit.
- d. Divisi pengiriman merekonsiliasi daftar barang dengan catatan penjualan sebelum mengirimkan barang bersama dengan catatan penjualan kredit kepada pelanggan.
- e. Bagian administrasi operasional membuat faktur dan meneruskannya ke pelanggan bersama dengan catatan penjualan.

Laporan Kas Keluar pada UMKM Hikmah

Prosedur pengeluaran kas.

- a. Bagian admin operasional melakukan pemesanan bahan baku ke toko langganan.
- b. Setelah penempatan pesanan, barang diterima bersama dokumentasi pengeluaran tunai.

Penerapan sistem akuntansi pada UMKM Hikmah

Penerapan sistem akuntansi di UD Hikmah sudah menerapkan pencatatan keuangan tapi masih secara manual dan sederhana, Ibu Sulis selaku istri dari pemilik yang menjadi admin sudah menerapkan dasar dasar akuntansi meskipun tidak semua diterapkan. Tahap-Tahap pencatatan akuntansi pada UMKM Hikmah adalah sebagai berikut:

1. Tahap pencatatan, dimulai dengan analisis yang cermat dan kategorisasi jenis transaksi, membedakan antara penerimaan kas dan pengeluaran tunai, diikuti dengan memasukkan transaksi tersebut secara manual ke dalam buku akuntansi.
2. Tahap penggolongan, terjadi setelah posting semua transaksi yang tercatat ke buku besar; Namun, UMKM Hikmah menyimpang dari praktik ini, karena UD Hikmah tidak menggunakan buku besar.
3. Tahap pengikhtisaran, prosedur awal melibatkan perumusan neraca atau daftar neraca, di mana semua transaksi secara sistematis dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya masing-masing. Meskipun demikian, UD Hikmah tidak terlibat dalam tahap pengakuan; sebaliknya, pada akhir periode akuntansi, UD Hikmah mengkonsolidasikan semua transaksi rahasia untuk memudahkan pembuatan laporan laba rugi dasar secara efisien.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan, UMKM Hikmah hanya mengumpulkan semua arus kas masuk dalam hubungannya dengan perkiraan barang dagangan, kemudian membandingkannya dengan arus kas keluar.

Alasan di balik ketidakpatuhan terhadap pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dikaitkan dengan kurangnya kesadaran pemilik akan keberadaan SAK EMKM. Selain itu, tidak adanya penerapan catatan akuntansi berdasarkan EMKM SAK dapat dianggap tidak hanya

karena kurangnya pemahaman standar akuntansi tetapi juga karena kurangnya pengawasan sosial, yang sangat penting untuk memantau pelaksanaan catatan keuangan untuk memastikan keselarasan dengan standar yang diterima secara umum; oleh karena itu, UMKM harus mematuhi SAK EMKM.

Pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM di UD Hikmah masih terbatas, karena hanya mencatat dan menggolongkan semua jenis transaksi. UMKM Hikmah juga tidak menyusun laporan keuangan secara menyeluruh, seperti yang dapat dilihat dari pencatatan akuntansi yang ada di UD Hikmah, yang hanya membandingkan jumlah kas masuk ditambah dengan jumlah barang dagangan dikurangi dengan jumlah kas keluar.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian analisis penerapan SAK EMKM pada UMKM Hikmah di Kota Tulungagung, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik pencatatan transaksi yang digunakan UMKM Hikmah Tulungagung masih belum sempurna dan tidak sejalan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk Usaha Kecil dan Menengah. Dokumentasi keuangan yang disiapkan oleh UMKM Hikmah Tulungagung terdiri dari catatan pembelian material, kegiatan produksi, dan catatan mengenai arus kas masuk dan keluar. Proses pengakuan dan pengukuran yang diberlakukan oleh MKM Hikmah tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM sehingga UD Hikmah harus tetap memperhatikan berbagai hal perusahaan, seperti pendaftaran aset lancar, manajemen inventaris, dan penyusutan aset tetap dan lancar.
2. Dalam hal presentasi laporan keuangan yang dilakukan UMKM Hikmah Tulungagung, mereka tidak sesuai dengan SAK EMKM, karena UMKM Hikmah Tulungagung gagal menghasilkan laporan yang selaras dengan SAK EKM. Oleh karena itu, presentasi tersebut tidak memenuhi kriteria representasi yang adil dalam pelaporan keuangan, khususnya mengenai penyediaan informasi yang relevan, memastikan penggambaran laporan keuangan yang akurat, berfungsi sebagai patokan untuk evaluasi komparatif kinerja keuangan UKM di berbagai periode, dan membuat laporan keuangan mudah dipahami untuk pengguna yang dihasilkan oleh UMKM. Sementara itu, laporan keuangan yang dihasilkan UMKM Hikmah Tulungagung tetap sederhana, disesuaikan dengan pemahaman dan kebutuhan pemilik, sehingga membuat data keuangan dan kinerja UMKM Hikmah Tulungagung tidak memadai dalam memenuhi standar penyajian yang ditetapkan oleh SAK EMKM.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis telah mengajukan rekomendasi kepada UMKM Hikmah Tulungagung sebagai berikut:

- a. Untuk mengelola keuangan bisnis, UMKM Hikmah Tulungagung harus mencatat atau membukukan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Praktik semacam itu akan memfasilitasi pemahaman yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan dan posisi keuangan, sehingga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi yang terinformasi yang berkaitan dengan upaya bisnis di masa depan.

- b. UMKM Hikmah Tulungagung dalam menyajikan laporan keuangan sebaiknya menggunakan pedoman SAK EMKM sehingga mampu menyajikan informasi mengenai keadaan kinerja UMKM secara detail, tepat dan perhitungan yang baik dalam usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM e-COMMERCE. In *Seminar Nasional Cendekiawan ke* (Vol. 4).
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2018). *PERSEPSI UMKM DALAM MEMAHAMI SAK EMKM SMEs PERCEPTIONS IN UNDERSTANDING THE ACCOUNTING STANDARD FOR SMEs* (Vol. 4).
- Muttaqien, F., Cahyaningati, R., Rizki, V. L., & Abrori, I. (2022). *Pembukuan Sederhana Bagi UMKM*.
- Purba, M. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM. In *Mortigor Afrizal Purba JURNAL AKUNTANSI BARELANG* (Vol. 3, Issue 2).
- Risal, & Wulandari, R. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA UMKM DI KOTA PONTIANAK*.